

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
PROVINSI JAMBI**



Skripsi Oleh:

NUR OCTAVIA GUSTRI SIDIK

01031381821001

Akuntansi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**

2021

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF
PENGARUH PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAMBI

Disusun oleh:

Nama : Nur Octavia Gustris Sidik

NIM : 01031381821001

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing
Ketua



Tanggal: 21 Juli 2021

Dr. E. Yusnaini, SE., M.Si., Ak
NIP. 197704172010122001

Anggota



Tanggal: 21 Juli 2021

Meita Rahmawati SE., M. Acc., Ak
NIP. 198605132015042002

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
PROVINSI JAMBI**

Disusun Oleh:

Nama : Nur Octavia Gustris Sidik
NIM : 01031381821001
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada Jumat, 6 Agustus 2021 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 14 September 2021

Ketua



Dr. E. Yusnaini, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 197704172010122001

Anggota



Meita Rahmawati, SE., M. Acc., Ak., CA
NIP. 198605132015042002

Anggota



Hj. Ermadiani, SE., M.M., Ak
NIP. 196608201994022001

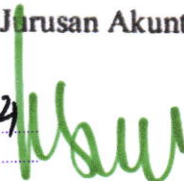
Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

ASLI

JURUSAN AKUTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

11/2021
10



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Octavia Gustri Sidik
NIM : 01031381821001
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

“Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi”

Pembimbing:

Ketua : Dr. E. Yusnaini, SE., M.Si., Ak., CA
Anggota : Meita Rahmawati, SE., M. Acc., Ak., CA
Tanggal Ujian: 6 Agustus 2021

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Palembang, 3 September 2021



Nur Octavia Gustri Sidik
01031381821001

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto:

Alon-alon asal klakon.

Sapa wani rekasa skripsi, bakal nggayuh wisuda.

Kupersembahkan kepada:

Ayah & Ibu tercinta

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan seluruh alam, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-nya, penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan judul Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi.

Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar sarjana ekonomi di Universitas Sriwijaya Palembang. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini bukanlah tujuan akhir dari suatu proses belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang membantu penyelesaian skripsi. Penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E, M.E Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Arista Hakiki, S.E, M.Acc, Ak., CA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Dra. Hj. Kencana Dewi, M.Sc., Ak Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Ibu Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E, M.M, Ak., CA. Selaku Koordinator Jurusan Akuntansi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. E. Yusnaini, SE., M.Si., Ak., CA dan Ibu Meita Rahmawati, SE., M. Acc., Ak., CA Selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing memberikan ilmu dan nasihat kepada penulis selama proses penulisan skripsi.

KATA PENGANTAR (Lanjutan)

7. Seluruh Dosen Pengajar, Staff, dan segenap pegawai Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama perkuliahan.
8. Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi yang telah memberi izin dan membantu penulis dalam menyediakan akses data guna menunjang penelitian.
9. Keluarga penulis yang telah memberikan semangat, dukungan finansial maupun moril serta doa yang tiada henti-hentinya.
10. Teman kuliah, terkhusus Marisca, Remanda, Vina, Wahyuni, Yunella. *Luvv*. Kepada teman yang mem-*bully* halus serta mendoakan kesehatan penulis; Biyu, Devi, Dhoffar, Ikhsan, Lisa, Sandi, Shelly. Kepada teman yang selalu menyenangkan sekaligus menjatuhkan hati dan perasaan penulis; Keke, Mayu, Regina. Tetaplah hidup. *Support* dari Alfenia, Putri, Vidia. *Kiss*. Terakhir untuk keluarga JPS yang setia dengan slogan ‘tetap menyerah jangan semangat’. *Astagfirullah*.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan laporan akhir ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-nya. Semoga laporan akhir ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak pihak demi kemaslahatan bersama serta bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. Aamiin allahumma aamiin.

Palembang, 11 September 2021

Nur Octavia Gustri Sidik

ABSTRAK

Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi

Oleh:

Nur Octavia Gustri Sidik, A.Md
Dr. E. Yusnaini, SE., M.Si., Ak., CA
Meita Rahmawati, SE., M. Acc., Ak., CA

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai variabel independen, serta menggunakan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen. Populasi penelitian ini adalah 1 kota dan 9 kabupaten yang berada di Provinsi Jambi dengan waktu pengamatan selama 4 tahun, dan jumlah observasi dalam penelitian ini adalah 40. Teknik *sampling* dalam penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling*. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan mencatat dan menelusuri data Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Jambi 2016-2019. Penelitian ini menganalisis data dengan menggunakan aplikasi *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Hasil penelitian ini adalah benar penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi.

Kata kunci: Pajak Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan, Pendapatan Asli Daerah.

Ketua,



Dr. E. Yusnaini, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 197704172010122001

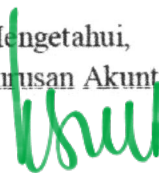
Anggota,



Meita Rahmawati, SE., M.Acc., Ak., CA
NIP. 198605132015042002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

ABSTRACT

The Influence of Motor Vehicle Tax Collection and Motor Vehicle Title Transfer Tax toward Original Regional Revenue of Jambi Province

By:

Nur Octavia Gustri Sidik, A.Md
Dr. E. Yusnaini, SE., M.Si., Ak., CA
Meita Rahmawati, SE., M. Acc., Ak., CA

This research's purpose is to examine the influence of Motor Vehicle Tax Collection and Motor Vehicle Title Transfer Tax toward Original Regional Revenue of Jambi Province. This research used Motor Vehicle Tax and Motor Vehicle Title Transfer tax as independent variables and Original Regional Revenue as the dependent variable. These research populations were 1 city and 9 regencies located in Jambi Province with time observation for 4 years, and the observation number in this research was 40. The sampling technic in this research used non-probability sampling technic. The data collection technic in this research used the documentation method by recording and browsing the data of Motor Vehicle Tax and Motor Vehicle Title Transfer Tax of Jambi Province in 2016-2019. This research analyzed the data using Statistical Product and Service Solution (SPSS) apps. The research result showed that Motor Vehicle Tax Collection and Motor Vehicle Title Transfer Tax are positively influenced the Original Regional Revenue of Jambi Province.

Keywords: *Local Tax, Motor Vehicle Tax, Motor Vehicle Title Transfer Tax, Original Regional Revenue.*

Chairman,



Dr. E. Yusnaini, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 197704172010122001

Member,



Meita Rahmawati, SE., M.Acc., Ak., CA
NIP. 198605132015042002

*Acknowledged By,
Head of Accounting Department*



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN

Kami Dosen Pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak dari mahasiswa

Nama : Nur Octavia Gustri Sidik
NIM : 01031381821001
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Judul : Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi

Telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Ketua,



Dr. E. Yusraini, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 197704172010122001

Anggota,



Meita Rahmawati, SE., M. Acc., Ak., CA
NIP. 198605132015042002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Mahasiswa : Nur Octavia Gustri Sidik
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tanggal Lahir : Jambi, 28 Oktober 1996
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : RT. 28 Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi



PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2014-2017 : Diploma III Akuntansi Universitas Jambi

PENDIDIKAN NON FORMAL

1. *Accountancy Class* Prospek (2019)
2. *English Class* FSAWC Universitas Sriwijaya (2021)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. KA Biro Administrasi, BEM KBM UNJA (2017)
2. KA PHM (*event*) Investor Saham Pemula Region Palembang (2020)

Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan Ujian Komprehensif.....	ii
Lembar Persetujuan Skripsi	iii
Surat Pernyataan Integritas Karya Ilmiah.....	iv
Moto dan Persembahan.....	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak.....	viii
<i>Abstract</i>	ix
Surat Pernyataan Abstrak.....	x
Daftar Riwayat Hidup	xi
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel.....	xv
Daftar Gambar	xvi
Daftar Persamaan	xvii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Sistematika Penulisan	11
BAB II Tinjauan Pustaka	13
2.1. Landasan Teori	13
2.1.1. Teori Kewajiban Pajak (Teori Bakti)	13
2.1.2. Teori Asas Gaya Beli	14
2.1.3. Pengertian Pajak	15
2.1.4. Fungsi Pajak	15
2.1.5. Jenis Pajak	16

Daftar Isi (Lanjutan)

2.1.6. Pengertian Pajak Daerah	18
2.1.7. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	18
2.1.8. Pajak Kendaraan Bermotor	19
2.1.9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	20
2.2. Penelitian Terdahulu	22
2.3. Alur pikir	28
2.4. Pengembangan Hipotesis	29
BAB III Tinjauan Pustaka.....	31
3.1. Ruang Lingkup Penelitian.....	31
3.2. Rancangan Penelitian.....	31
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	31
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.5. Populasi dan Sampel.....	32
3.6. Variabel Penelitian.....	34
3.6.1. Variabel Independen.....	34
3.6.2. Variabel Dependen	34
3.7. Teknik Analisis Data	35
3.7.1. Uji Asumsi Klasik	35
3.7.2. Uji Hipotesis.....	37
3.7.3. Analisis Koefisien Determinasi (Adjusted R ²).....	40
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	41
4.1. Deskripsi Objek Penelitian.....	41
4.1.1. Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi	41
4.1.2. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.....	43
4.2. Hasil Uji Asumsi Klasik	44
4.2.1. Hasil Uji Normalitas	44
4.2.2. Hasil Uji Multikolinearitas	45

Daftar Isi (Lanjutan)

4.2.3. Hasil Uji Heteroskedastisitas	46
4.2.4 Hasil Uji Autokorelasi	47
4.3. Uji Hipotesis.....	48
4.3.1. Analisis Uji t.....	48
4.3.2. Analisis Uji F	50
4.3.3. Analisis Adjusted R Square	51
4.3.4. Analisis Koefisien Determinasi.....	52
4.4. Pembahasan.....	53
4.4.1. Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	53
4.4.2. Pengaruh Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	54
4.4.3. Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan	55
BAB V Kesimpulan dan Saran.....	57
5.1. Kesimpulan.....	57
5.2. Keterbatasan Penelitian.....	58
5.3. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	64

Daftar Tabel

Tabel 1.1. Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi Tahun 2016-2019	4
Tabel 1.2. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi Tahun 2018-2019.....	5
Tabel 1.3. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi Tahun 2019	7
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3.1. Populasi Penelitian	33
Tabel 4.1. Pengujian Normalitas.....	44
Tabel 4.2. Pengujian Multikolinearitas	45
Tabel 4.3. Pengujian Glejser.....	47
Tabel 4.4. Pengujian Autokorelasi.....	48
Tabel 4.5. Hasil Uji t	49
Tabel 4.6. Hasil Uji F	50
Tabel 4.7. Adjusted R Square	51
Tabel 4.8. Koefisien Determinasi	53

Daftar Gambar

Gambar 2.1. Alur Pikir.....	29
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.....	43
Gambar 4.2. Grafik scatterplot	46

Daftar Persamaan

Persamaan Thitung (i).....	39
Persamaan Koefisien Determinasi (ii)	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun daerah. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan pemerintahan provinsi maupun pemerintah daerah atau kota yang merupakan bagian dari keberhasilan kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan mengenai keuangan daerah dilakukan oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat mengelola dan mengolah pendapatan daerahnya guna membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena tujuan akhir dari otonomi daerah adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera (Ferdiansyah, 2020). Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah tersebut adalah dengan melakukan berbagai kebijakan, diantaranya mendorong pendapatan daerah sebesar-besarnya sebagai sumber pemasukan.

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintah dan

pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang terpenting yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan daerah dan pembangunan daerah. Berbagai kebijakan yang lebih komprehensif, efektif dan efisien dijalankan guna mencapai tujuan daerah yang maksimal untuk melaksanakan pengelolaan dengan baik (Winarso, 2015).

Pendapatan Asli Daerah merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan melalui Pendapatan Asli Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya. Pendapatan Asli Daerah memiliki peran sebagai sumber pendapatan yang mengharuskan pemerintah daerah memaksimalkannya (Asmarani, 2020).

Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat diandalkan dari sektor perpajakan adalah pajak daerah. Menurut UU Nomor 34 Tahun 2000, Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, sedangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah menyebutkan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan

daerah. Pemerintah daerah berusaha meningkatkan pendapatan daerah dengan memaksimalkan pajak daerah, yaitu pajak provinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pajak daerah kabupaten/kota seperti Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan pajak lainnya (Zulkifli, 2013).

Terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa pajak daerah yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian Periansya (2017) mengungkapkan bahwa pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan pajak. Pajak daerah tersebut adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan ditandai dengan naiknya jumlah kendaraan bermotor yang ada di masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang peraturan

pajak daerah provinsi yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Agustina, 2015).

Tabel 1.1. Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi Tahun 2016-2019

Jenis Kendaraan	Tahun/Jumlah Kendaraan			
	2016	2017	2018	2019
Mobil	189,212	209,396	164,527	196,834
Motor	1,549,747	1,657,018	1,160,179	1,286,277

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2021 (diolah).

Berdasarkan Tabel 1.1. Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi tahun 2016-2019 berfluktuasi. Hal ini menunjukkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor harus dikelola dengan baik agar tidak memengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Provinsi Jambi perlu melakukan upaya efektivitas dan efisiensi dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jambi dipungut melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh unit pelayanan Kantor Bersama SAMSAT melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, Polisi Republik Indonesia, dan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero). Proses pencatatan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor menggunakan Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) dalam pengurusan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), pembayaran Pajak, BBNKB (Bea Balik Nomor Kendaraan Bermotor) dan Sumbangan Wajib

Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), semuanya dilakukan dalam satu atap sehingga masyarakat mudah dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Salah satu sumber pendapatan daerah berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah, maka sudah sewajarnya untuk setiap individu pribadi atau masyarakat pemilik kendaraan bermotor untuk taat dan tepat waktu dalam membayar pajak sesuai dengan Undang-undang guna memperlancar program maupun kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah. (Siagian, 2019). Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi sebagai salah satu badan teknis di bidang pemungutan pendapatan daerah di Provinsi Jambi, yang melaksanakan kewenangan untuk melakukan pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah khususnya pemungutan pajak Provinsi Jambi berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009.

Tabel 1.2. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi Tahun 2018-2019

No	Kabupaten/Kota	Tahun			
			2018		2019
1.	Kota Jambi	Rp	251.731.577.006	Rp	257.038.629.080
2.	Batanghari	Rp	25.344.398.400	Rp	27.061.302.300
3.	Tanjab Barat	Rp	13.554.247.730	Rp	15.351.051.780
4.	Merangin	Rp	29.014.004.300	Rp	28.578.186.300
5.	Bungo	Rp	33.006.225.526	Rp	33.208.484.800
6.	Kerinci	Rp	17.389.918.600	Rp	20.471.181.450
7.	Tanjab Timur	Rp	17.455.100.850	Rp	16.375.413.570

Tabel 1.2. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi Tahun 2018-2019 (Lanjutan)

No	Kabupaten/Kota	Tahun			
			2018		2019
8.	Muaro Jambi	Rp	21.650.426.600	Rp	23.208.442.200
9.	Sarolangun	Rp	14.977.606.400	Rp	16.058.929.400
10.	Tebo	Rp	19.933.116.750	Rp	20.481.479.450

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, 2021.

Berdasarkan Tabel 1.2. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi tahun 2018 dan 2019, jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tertinggi adalah Kota Jambi, yang mana diperoleh Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp251.731.577.006 pada tahun 2018 dan diperoleh Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp257.038.629.080 pada tahun 2019. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terendah di Provinsi Jambi pada tahun 2018 adalah di Kabupaten Tanjab Barat yaitu hanya sebesar Rp13.554.247.730, kemudian pada tahun 2019 adalah di kabupaten yang sama yaitu Tanjab Barat sebesar Rp15.351.051.780.

Seluruh penelusuran angka Pajak Kendaraan Bermotor di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan yang masih baik, kecuali Kabupaten Merangin, Muaro Jambi dan Tanjab Timur. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Merangin di tahun 2018 adalah sebesar Rp29.014.004.300, sementara di tahun 2019 sebesar Rp29.014.004.300. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muaro Jambi di tahun 2018 adalah sebesar Rp21.650.426.600, sementara di tahun 2019 sebesar Rp23.208.442.200. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjab Timur di tahun 2018 adalah sebesar Rp17.455.100.850, sementara di tahun 2019 sebesar Rp16.375.413.570.

Penelitian mengenai Pendapatan Asli Daerah telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu, seperti hasil dari penelitian Ferdiansyah (2020) tentang Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menurut penelitian Agustina (2015) tentang Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah, sementara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 1. 3. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi Tahun 2018-2019

Kab/ Kota	Pendapatan Asli Daerah				Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor			
	2018		2019		2018		2019	
Kota Jambi	Rp	652.333.033.418	Rp	626.590.450.542	Rp	400.178.697.200	Rp	369.086.914.250
Batang- hari	Rp	25.404.883.697	Rp	27.133.742.403	Rp	4.930.300.000	Rp	4.378.644.000
Tanjab Barat	Rp	13.937.420.054	Rp	15.589.656.595	Rp	22.307.000	Rp	22.027.850
Merangin	Rp	29.484.298.400	Rp	28.838.623.800	Rp	419.535.400	Rp	198.492.700
Bungo	Rp	33.333.139.527	Rp	33.487.421.955	Rp	224.910.700	Rp	168.021.975
Kerinci	Rp	22.416.193.725	Rp	25.002.877.020	Rp	4.930.300.000	Rp	4.378.644.000
Tanjab Timur	Rp	17.461.980.950	Rp	16.391.921.570	Rp	102.914.200	Rp	89.306.700
Muaro Jambi	Rp	21.772.033.800	Rp	23.317.271.700	Rp	51.333.000	Rp	14.055.800
Saro- lungun	Rp	15.136.237.406	Rp	16.170.980.817	Rp	112.114.200	Rp	69.307.700
Tebo	Rp	20.137.540.450	Rp	20.600.997.850	Rp	181.422.500	Rp	92.694.900

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, 2021 (diolah).

Berdasarkan Tabel 1.3. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi tahun 2018 dan 2019, jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah tertinggi adalah Kota Jambi, yang mana diperoleh Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp652.333.033.418 pada tahun 2018 dan diperoleh Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp626.590.450.542 pada tahun 2019. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terendah di Provinsi Jambi pada tahun 2018 dan 2019 adalah di Kabupaten Tanjab Barat, dimana Kabupaten Tanjab Barat memperoleh penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp 13.937.420.054 dan Rp15.589.656.595 meskipun Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Tanjab Barat pada tahun tersebut dapat dikatakan meningkat. Kabupaten Tanjab Barat juga sebagai penerima Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi tahun 2018 dan 2019 yaitu sebesar Rp 22.307.000 dan Rp22.027.850.

Seluruh penelusuran angka Pendapatan Asli Daerah di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan yang masih baik, kecuali Kabupaten Merangin dan Kabupaten Tanjab Timur. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin di tahun 2018 adalah sebesar Rp29.484.298.400, sementara di tahun 2019 sebesar Rp28.838.623.800. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjab Timur di tahun 2018 adalah sebesar Rp17.461.980.950, sementara di tahun 2019 sebesar Rp16.391.921.570.

Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi mengalami sedikit penurunan di tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya 2018. Penghasil pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tertinggi tahun 2018 adalah Kota Jambi yaitu sebesar Rp400.178.697.200, namun penerimaan pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kota Jambi tahun 2019 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp369.086.914.250. Seluruh penelusuran angka Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan yang masih baik, kecuali Kabupaten Bungo. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo di tahun 2018 adalah sebesar Rp224.910.700, sementara di tahun 2019 sebesar Rp168.021.975.

Berdasarkan tabel yang sudah disajikan serta perbedaan hasil riset yang telah ada, maka penulis termotivasi ingin menganalisis serta melakukan suatu penelitian dengan mengajukan judul **Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi.**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaruh penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi?

- b. Bagaimana pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi?
- c. Bagaimana pengaruh penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi secara simultan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai:

- a. Pengaruh penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi.
- b. Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi.
- c. Pengaruh penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak akademis dan penelitian selanjutnya tentang Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama terhadap Pendapatan Asli Daerah

Provinsi Jambi, serta memperoleh bukti empiris terkait hal-hal yang memengaruhinya.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung pada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti yang dijabarkan sebagai berikut:

1). Bagi Pemerintah

Manfaat bagi pemerintah diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi dalam mengevaluasi dan mengambil keputusan mengenai pengoptimalan kepada pendapatan asli daerah dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2). Bagi Wajib Pajak Perorangan

Bagi wajib pajak perorangan diharapkan dapat menjadi masukan agar individu dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan yang berlaku.

3). Bagi Peneliti Lain

Manfaat penelitian ini bagi peneliti lain, yaitu dapat menjadi rujukan, sumber informasi, dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan untuk meningkatkan kualitas penelitian.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN

Bab ini menguraikan landasan teori sebagai landasan dalam pembahasan permasalahan dalam penelitian ini, penelitian terdahulu, dan alur pikir, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang ruang lingkup penelitian, rancangan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian, yang mencakup gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data, dan hasil perhitungan statistika serta pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan kesimpulan dari analisis data, keterbatasan dalam penelitian, serta saran yang sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R. A. (2015). Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003-2012. STIE Nasional Banjarmasin.
- Altius, Herliene Yudhah. (2013). Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Bagi Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara.
- Asmarani, Nora Galuh Candra. (2020). Apa itu Pendapatan Asli Daerah. <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-pad-22664>. Diakses pada tanggal 1 Maret 2021 pukul 21.30
- Bougie, & Sekaran. (2017). Metode Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Artikel: Kendaraan Bermotor menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan (unit) di Provinsi Jambi. <https://jambi.bps.go.id/dynamictable/2019/11/19/1510/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kendaraan-unit-di-provinsi-jambi-2018-.html>. Diakses pada tanggal 2 Maret 2021.
- Ferdiansyah. (2020). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sebagai Pemoderasi Provinsi Jawa Barat. Universitas Pamulang.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate. Semarang: UNDIP.
- Jumaiyah, & Wahidullah. (2021). Pajak Penghasilan: Teori, Kasus dan Praktik. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Maznawaty, Elvi Syahria. (2015). Analisis Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara. Universitas Sam Ratulangi.

DAFTAR PUSTAKA (Lanjutan)

- Pangesti, Niken Anggraeni. (2020). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Pajak Air Permukaan (PAP) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah. Universitas Pancasakti Tegal.
- Pemerintah Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- _____. (2001). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001. Tentang Pajak Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- _____. (2000). Undang-Undang Republik Indonesia No 34 Tahun 2000. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi. Nomor 8 Tahun 2016. Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- _____. Nomor 19 Tahun 2016. Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Periansya (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Priyastama, R. (2017). Pengolahan Data dan Analisis Data SPSS. Bantul: PT Anak Hebat Indonesia.
- Resmi, Siti. 2017. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Ridwan, Muhammad. (2021). Data Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jambi. Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.
- Rinika, Desti. (2020). Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Universitas Pembangunan Panca Budi.

DAFTAR PUSTAKA (Lanjutan)

- Siagian, Frans Eric Junior. (2019). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Universitas Tridinanti.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Umar, Husein. (2015). Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis (Edisi Kedua). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Winarso, Widi. (2015). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi. Universitas Bina Sarana Informatika.
- Yuskar. (2014). Analisis Efektivitas dan Faktor-faktor yang Memengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera Barat. Universitas Andalas.
- Zulkifli. (2013). Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. Universitas Negeri Gorontalo.